

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Desa Fokus ke Infrastruktur & Pemberdayaan
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.6
Edisi	: Senin, 5 Februari 2018

## *Dana Desa Fokus ke Infrastruktur & Pemberdayaan*

### **NGAMPRAH, (PR).-**

Para aparat desa diminta agar fokus menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibutuhkan agar realisasi dana desa terserap secara optimal mengingat jumlah anggaran yang besar, yakni Rp 1 miliar lebih per desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Wandiana mengungkapkan, penggunaan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2018.

"Mengacu pada permen tersebut, setiap desa harus bisa merealisasikan program kerja

sesuai dengan APB Desa 2018, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawabannya," ujar Wandiana, akhir pekan lalu.

Menurut dia, dana desa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini bisa didukung dengan memberdayakan badan usaha milik desa untuk membantu merealisasikan berbagai program kerja yang sudah disusun.

"Misalnya, untuk membangun infrastruktur, materialnya bisa memanfaatkan yang ada di desa jika ada. Jadi, uang pembangunan berputar di desa sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, tujuan dana desa disalurkan salah satunya

agar pembangunan di desa terus berkembang dan maju setiap tahun. Alasannya, kemajuan suatu daerah berawal dari perkembangan di setiap desa.

Dia menyebutkan, tahun 2018 dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 198 miliar, lebih besar dibandingkan tahun 2017 lalu yang hanya Rp 152 miliar. Dengan berbagai sumber keuangan lainnya, setiap desa rata-rata mendapatkan dana Rp 2 miliar.

"Untuk itu sering saya sampaikan ke setiap kepala desa agar memaksimalkan pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Bahkan, dana desa itu harus juga diumumkan kepada masyarakat secara terbuka," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan,

penggunaan dana desa di Kabupaten Bandung Barat mulai tahun ini melibatkan kepolisian. Polisi berfungsi memberikan pendampingan kepada aparat desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana desa.

Polisi yang bertugas melakukan pendampingan tersebut, yaitu petugas Babinkamtibmas di setiap desa. Aparat desa harus melibatkan petugas tersebut dalam setiap pertemuan dan pembahasan mengenai dana desa.

"Kepolisian bukan untuk membuat aparat desa takut, tetapi justru untuk memberikan konsultasi dan pendampingan agar tidak terjadi penyalahgunaan," katanya.

Penggunaan dana desa di Kabupaten Bandung Barat ter-

pantau melalui aplikasi perangkat lunak Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan aplikasi tersebut, pemerintah desa diwajibkan melaporkan keuangan desa secara transparan.

Aplikasi Siskeudes mencakup semua laporan keuangan desa, mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hingga APBDes. Pemerintah desa diminta untuk terus memperbaiki laporan keuangan secara berkala dengan aplikasi itu. (Cecep Wijaya)\*\*\*